



PENETAPAN

Nomor 603/Pdt.P/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Aco bin Sattu**, umur 46 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Pokko, 17 Agustus 1974, NIK. 7604131708740001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lingkungan Kabulingan, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, disebut **Pemohon I**.

**Anja binti Nuba**, umur 38 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Pokko, 19 September 1982, NIK. 7604135909820001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Kabulingan, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 603/Pdt.P/2020/PA.Pwl tanggal 9 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan Surat Kepala

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 603/Pdt.P/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor B-837/Kua.31.03.12/Pw.01/09/2020, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **Faisal bin Aco** dengan **Hariani binti Hasruddin** dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Faisal bin Aco**, umur 16 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Pokko, 15 Juni 2004, NIK. 7604131506040001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat Kediaman di Lingkungan Kabulingan, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan bernama **Hariani binti Hasruddin**, umur 15 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Tumpiling, 1 Mei 2005, NIK. 7604034105050001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Tumpiling, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama kurang lebih 4 bulan dan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah sangat dekat, dan bahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 603/Pdt.P/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri /ibu rumah tangga;

6. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Faisal bin Aco** dengan seorang perempuan bernama **Hariani binti Hasruddin**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Para Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon tersebut mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (Faisal bin Aco) sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang perempuan bernama Hariani binti Hasruddin;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan anak Para Pemohon bersedia menikah dengan Hariani binti Hasruddin;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 603/Pdt.P/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh, namun umur anak Para Pemohon masih 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa keluarga Para Pemohon telah melamar dan pihak keluarga calon istri telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Bahwa di samping itu calon istri anak Para Pemohon (Hariani binti Hasruddin), telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri anak Para Pemohon akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Faisal bin Aco;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon istri anak Para Pemohon bersedia menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh namun belum cukup umur;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon yang bernama Hasruddin bin Muhtar dan Hasmia binti Kaco (orang tua calon istri) telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri anak Para Pemohon akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Faisal bin Aco;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon istri anak Para Pemohon bersedia menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh namun belum cukup umur;
- Bahwa keluarga anak Para Pemohon telah melamar dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 603/Pdt.P/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon sanggup memberikan nasihat serta membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. SURAT-SURAT:

1.

Fotokopi Surat Penolakan pernikahan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Nomor : B-837/Kua.31.03.12/PW.01/09/2020, telah dinazzezel/dibubuhi meterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-1);

2.

Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Aco, Nomor: 7604130311110016 tertanggal 2 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali, fotokopi mana telah dinazzezel/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-2);

3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aco, NIK. 7604131708740001 tertanggal 23 Mei 2012, fotokopi mana telah dinazzezel/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-3);

4.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anja, NIK. 7604135909820001 tertanggal 23 Mei 2012, fotokopi mana telah dinazzezel/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-4);

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 603/Pdt.P/2020/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faisal Nomor 26637/UM/XI/2005 tanggal 30 November 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-5);

6.

Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Faisal, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dalam hal ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah DDI No. 0317 Pulele, Kabupaten Polewali Mandar, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-6);

## B. SAKSI- SAKSI :

1. Supratman bin Abdul Asiz, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Camat Anreapi, bertempat kediaman di Jalan Poros Mamasa, Lingkungan Kabulingan, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon I dan pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Faisal bin Aco, tetapi pada waktu Para Pemohon melaporkan rencana pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, ternyata ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan anak Para Pemohon masih di bawah standar umur pernikahan bagi anak laki-laki;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama Hariani binti Hasruddin;
  - Bahwa anak Para Pemohon sudah melamar dan telah diterima baik oleh keluarga calon istri anak Para Pemohon;
  - Bahwa status anak Para Pemohon adalah perjaka dan calon istri anak Para Pemohon adalah perawan;
  - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 603/Pdt.P/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;  
- Bahwa setahu saksi calon istri anak Para Pemohon tersebut Hariani binti Hasruddin tidak dalam lamaran laki-laki lain kecuali anak Para Pemohon;

- Bahwa antara calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai serta tidak dapat dipisahkan lagi ;

-  
Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai petani;

2. Saripuddin bin Juma, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat kediaman di Jalan Poros Mamasa, Lingkungan Kabulingan, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai Paman Pemohon I dan pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Faisal bin Aco, tetapi pada waktu Para Pemohon melaporkan rencana pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, ternyata ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan anak Para Pemohon masih di bawah standar umur pernikahan bagi laki-laki yaitu minimal 19 tahun;

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama Hariani binti Hasruddin;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah melamar dan telah diterima baik oleh keluarga calon istri anak Para Pemohon;

- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perjaka dan calon istri anak Para Pemohon adalah perawan;

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

- Bahwa setahu saksi calon istri anak Para Pemohon yang bernama Hariani binti Hasruddin tidak dalam lamaran laki-laki lain kecuali anak Para Pemohon;

- Bahwa antara calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai serta tidak dapat

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 603/Pdt.P/2020/PA.Pwl



dipisahkan lagi;

- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai petani;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon merasa tidak berkeberatan atas keterangan yang diberikan kepada Hakim, selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon dalam posita permohonannya telah mempunyai *kedudukan* dan atau *kepentingan hukum* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Pemohon, calon suami istri dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

*Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 603/Pdt.P/2020/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nasihat tersebut dimuka, Para Pemohon, calon suami istri dan orang tua calon istri anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya sebagaimana pada permohonannya karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, calon suami istri dan orang tua calon istri anak Para Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, *karena keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat*, namun rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon, hal ini memenuhi maksud Pasal 13 angka (1) huruf (a), (b), (c) dan huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P-1 sampai dengan bukti P-6) dan dua orang saksi serta atas keterangan para saksi dan bukti surat yang telah diajukan Para Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya namun ditolak karena faktor umur yang belum mencukupi batas umur minimal seorang laki-laki yang akan menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4 berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, membuktikan bahwa Para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Polewali berwenang;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Faisal, membuktikan bahwa Faisal adalah anak kandung dari Para Pemohon yang sekarang masih berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 603/Pdt.P/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa ijazah atas nama Faisal, membuktikan bahwa Faisal adalah orang yang mempunyai pendidikan dan telah pernah mengenyam pendidikan pada bangku sekolah;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Supratman bin Abdul Asiz dan Saripuddin bin Juma, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Faisal bin Aco, umur 16 tahun 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran selama 4 (empat) bulan dan sudah sering bepergian berdua;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perjaka dan status calon istrinya berstatus perawan;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 603/Pdt.P/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dan telah mempunyai penghasilan untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 603/Pdt.P/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Faisal bin Aco, umur 16 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Hariani binti Hasruddin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon bernama Faisal bin Aco untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hariani binti Hasruddin;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 *Hijriah*, oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Candra Wardana, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

**Samsidar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 603/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 603/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)